

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu upaya mengatasi masalah kemiskinan, adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi perekonomian di pedesaan. Dengan meningkatkan kapasitas produksi agregat perekonomian melalui peningkatan input dan peningkatan efisiensi merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera dapat terwujud apabila warga negara turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Penyelenggaraan dana desa merupakan bentuk penambahan modal untuk menunjang perekonomian di pedesaan. Dalam mengalokasikan dana desa, pengelola dana desa dituntut untuk memenuhi syarat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Mardiasmo 2018 *Good Governance* sebagai penerapan manajemen yang solid dan bertanggung jawab dalam pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Menghindari alokasi dan investasi yang salah, dan mencegah korupsi politik dan administrasi. Menerapkan disiplin anggaran untuk menciptakan kerangka hukum dan politik untuk pertumbuhan kegiatan di dunia bisnis.

Diperlukan tiga aspek untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu dengan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemberian wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar

kepada pemerintah daerah secara lebih mandiri akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya melalui otonom dalam memilih prioritas pembangunan yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menata pengelolaannya dengan lebih baik, dimulai dari perencanaan, formulasi tata kelola yang baik, bagus, dan administratif.

Tujuan pengelolaan sektor publik yaitu kesejahteraan sosial tentunya memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada awalnya banyak diterapkan pada sektor swasta, yang mengacu pada pengertian pengendalian dan sistem pengendalian perusahaan. Dalam konteks yang lebih luas, isu tata kelola berkaitan dengan permasalahan pengendalian dan kekuasaan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, termasuk organisasi nirlaba.

Dapat disimpulkan bahwa *good governance* dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan apabila diimplementasikan dalam kebijakan publik dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penerapan *Good Governance* harus bebas dari pengaruh politik dan kepentingan kelompok tertentu. Penerapan tata kelola yang baik (*Good Governance*) perlu dilakukan secara optimal dan komprehensif agar setiap kebijakan publik yang dikeluarkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Kepercayaan berarti mengakui kejujuran dan kemampuan seseorang untuk memenuhi harapan. Dapat diartikan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan suatu individu dalam menduduki suatu jabatan karena diakui

memiliki kemampuan dan kejujuran untuk memangku jabatan itu sehingga benar-benar dapat memenuhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan yaitu kredibilitas, sikap dan kompetensi. Salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan public salah satunya adalah dengan menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Apabila pemerintah tidak akuntabel dan transparan maka akan berdampak negatif terhadap masyarakat, seperti berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat didukung oleh prinsip-prinsip sebagai berikut partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsive, kesetaraan dan keadilan, serta akuntabilitas. Dana desa adalah dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan diperuntukkan bagi desa, dan disalurkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, diperlukan adanya aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *Good Governance*, akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas apa yang telah dilakukan, dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Akuntabilitas dalam pemerintahan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan otonomi

desa agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, diperlukan adanya unsur transparansi agar terselenggaranya *good governance*.

Transparansi adalah keterbukaan terhadap suatu tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menghasilkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan publik melalui penyediaan informasi dan jaminan dalam memperoleh kemudahan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi merujuk kepada keterbukaan kebijakan, peraturan, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah kepada publik. Transparansi dan Akuntabilitas adalah kunci tata kelola yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu pemerintah desa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara transparan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengetahui mengenai proses pengelolaan dana desa. Berdasarkan sumber berita *online* yang tersebar diketahui bahwa permasalahan dana desa yang muncul di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan penyalahgunaan dana desa, pembangunan infrastruktur fiktif, beberapa rencana pembangunan desa yang tidak terealisasi, dan tindak pidana korupsi. (*newsletter*, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh, alokasi dana untuk 144 Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1****Dana Alokasi Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No.	Nama Daerah	Tahun	Jumlah Dana
1	Kab. Hulu Sungai Selatan	2020	1.174.840.000
2	Kab. Hulu Sungai Selatan	2021	1.161.925.000
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	2022	1.482.968.000

*Sumber: Kantor Desa Gambah Dalam 2020-2022*

Berdasarkan data dana desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dana yang diterima tertinggi pada tahun 2022 sebesar 1.482.968.000 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 1.174.840.000 dalam kurun waktu tiga tahun, hal itu disebabkan oleh alokasi dana desa untuk pembangunan dari tahun 2019 – 2021 dipindahkan untuk membantu masyarakat selama pandemi covid-19 berlangsung.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga di Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masyarakat masih ragu terhadap pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Gambah Dalam yang disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat luas dalam program pemanfaatan Dana Desa. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan”**

### **1.2. Rumusan Masalah.**

- a. Apakah akuntabilitas dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
- b. Apakah transparan dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
- c. Apakah akuntabilitas dan transparan dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

### **1.3. Batasan Masalah.**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Penulis hanya melakukan penelitian ini pada tahun 2020 – 2022.
- b. Penulis hanya melakukan penelitian di Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Topik dan pembahasan dalam laporan penelitian ini hanya fokus pada akuntabilitas dan transparansi pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- d. Kepercayaan yang dimaksud dalam penelitian ini terbatas pada bentuk perilaku masyarakat dalam hubungan timbal balik yang mempengaruhi sikap dan respon masyarakat di Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **1.4. Manfaat Penelitian.**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang akuntabilitas dan transparansi dana desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik.

### **1.4.2 Kegunaan Peraktis**

#### **a Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang akuntabilitas dan transparansi dana desa. Selain itu juga menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

#### **b Bagi Pemerintahan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif kepada pemerintah daerah/kabupaten dan pemerintahan desa dalam memberikan dan menyempurnakan kebijakan yang dilakukan sekarang dan akan mendatang.

#### **c Bagi Akademik**

Sebagai perbendaharaan kepustakaan dan wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang.

#### **d Bagi Penelitian Selanjutnya**

Sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

### **1.5. Sistematika Penulisan.**

#### **BAB I           PENDAHULUAN.**

Bab ini menjelaskan pendahuluan yang menjadi dasar dari setiap karya ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

#### **BAB II          LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.**

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Kajian teori menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori pendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi, kemudian dikemukakan kerangka berpikir yang merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian dan memperlihatkan masalah dalam penelitian dan kemudian dikemukakan hipotesis yang memberikan arah bagi penelitian yang akan dilaksanakan, mencegah peneliti

melakukan penelitian coba-coba, membantu peneliti untuk menghindari berbagai variabel pengganggu dan menjadi dugaan awal hasil penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN.

Berisi penjelasan tentang langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan instrumen penelitian yang digunakan.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan. Gambaran umum merupakan penyajian informasi tentang objek penelitian. Hasil penelitian merupakan penjelasan dari penyajian data penelitian yang telah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan deskriptif, sehingga dapat memperjelas penyajian tabel atau grafik.

### BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi/saran, dan keterbatasan. Kesimpulan adalah pemaparan singkat dari apa yang diperoleh dari pembahasan dan jawaban dari

hipotesis awal dan saran adalah saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak yang berkepentingan mengenai hasil penelitian dan peranannya bagi penulis selanjutnya.